

Pemerintah Kecamatan Kodeoha Rakor Jelang Pilkada, Tekankan Netralitas dan Stabilitas Keamanan

Kolaka Utara, Sultranet.com - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Kecamatan Kodeoha menggelar rapat koordinasi (Rakor) pada Kamis (21/11/2024) di Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Rakor yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri berbagai elemen stakeholder untuk membahas pelaksanaan, pengawasan, netralitas, dan stabilitas keamanan Pilkada.

Acara dipimpin oleh Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, dan dihadiri Kapolsek Kodeoha Ipda Riyanto Sarira, SH; Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baso Maryam M.; perwakilan Panwascam Kodeoha, Ariyadi Saputra; kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kodeoha; ketua PKK kecamatan dan desa/kelurahan; serta ketua BPD dan LPM. Kegiatan diawali doa bersama yang dipimpin oleh Nurdin, S.Ag., staf Kantor Kecamatan Kodeoha, sebagai bentuk harapan agar seluruh tahapan kegiatan berjalan lancar.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN, kepala desa, dan aparat desa dalam menjalankan tugas selama tahapan Pilkada. "Netralitas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Saya harap kita semua bisa menjaga profesionalisme dan integritas," tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga kelancaran pesta demokrasi ini Pilkada 2024 agar berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin terbaik untuk daerah.

"Kesuksesan Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Pilkada yang damai, netral, dan berkualitas," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolsek Kodeoha, Ipda Riyanto Sarira, SH, menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mengawal Pilkada yang aman dan tertib. Ia

menjelaskan bahwa Polsek Kodeoha telah memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemungutan suara.

“Kami siap memastikan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Kecamatan Kodeoha. Pihak keamanan akan menindak tegas pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya Pilkada,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan ASN dan aparat desa untuk berhati-hati dalam bersikap agar tidak terlibat dalam pelanggaran yang dapat berdampak hukum.

Ketua PPK Kecamatan Kodeoha, Baso Maryam M., menjelaskan berbagai langkah persiapan teknis yang telah dilakukan, termasuk pendataan wajib pilih. Hingga saat ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan sebanyak 7.985 pemilih, tersebar di 21 TPS di 11 desa dan satu kelurahan.

“Kami juga telah mendata 58 pemilih tambahan dalam DPTb. Saat ini, kami masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Kolaka Utara untuk distribusi logistik dan pemberitahuan pemilih ke TPS,” ungkapnya.

Ia berharap kepala desa dapat mendukung kesiapan lokasi distribusi logistik di masing-masing desa.

Sementara itu, perwakilan Panwascam Kodeoha, Ariyadi Saputra, menegaskan bahwa pengawasan terhadap tahapan Pilkada akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada penetapan DPT, pemetaan TPS, dan pelanggaran kode etik ASN maupun aparat desa.

“Panwascam akan memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan. Kami juga akan menindaklanjuti temuan yang berpotensi melanggar kode etik atau regulasi Pilkada,” katanya.

Rakor berjalan lancar dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan sukses.

KPU Bombana Imbau Warga Salurkan Hak Pilihnya di Pilkada 27 November 2024

Bombana, sultranet.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nampo, menegaskan bahwa Pilkada merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan di Kabupaten Bombana selama lima tahun ke depan.

“Pilkada serentak 2024 adalah hak konstitusi setiap warga negara. Kami berharap masyarakat tidak melewatkan kesempatan ini untuk menentukan masa depan daerah kita,” ujar Hasdin. Kamis (21/11/2024)

Dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada, KPU juga mengimbau seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung partisipasi para pekerja dengan memberikan waktu kepada mereka untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Kami berharap pihak swasta turut mendukung dengan memberi kesempatan kepada karyawannya menggunakan hak pilih tanpa hambatan. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga Bombana dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi,” lanjut Hasdin.

Pemerintah telah menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor 1 Tahun 2024.

Penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemilih. KPU juga

mengingatkan warga untuk memanfaatkan waktu libur ini dengan bijak, memastikan mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan untuk memberikan suaranya.

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bombana akan diikuti oleh tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan suara rakyat. Ketiga pasangan tersebut adalah Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selanjutnya, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Pasangan ketiga adalah Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

KPU Bombana mengajak seluruh masyarakat untuk mengenali lebih dalam visi, misi, serta program kerja dari masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Menurut Hasdin, pemilih yang cerdas adalah mereka yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memastikan pilihannya berdasarkan pertimbangan matang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mencermati program kerja yang ditawarkan para calon. Pilihlah pemimpin yang memiliki komitmen nyata untuk memajukan Bombana,” katanya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, KPU Bombana telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Hasdin juga meminta warga untuk mengecek nama mereka di Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih.

“Jangan sampai hak pilih Anda hilang hanya karena tidak terdaftar di DPT. Segera cek dan laporkan jika ada kendala,” tegasnya.

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 akan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil mulai 27 November hingga 16 Desember 2024. Hasdin berharap, proses ini dapat berjalan lancar, jujur, dan adil.

Ia juga meminta semua pihak, termasuk para pendukung pasangan calon, untuk menjaga ketertiban selama masa Pilkada berlangsung.

“Kami ingin Pilkada di Bombana menjadi contoh proses demokrasi yang damai dan bermartabat. Mari bersama-sama kita wujudkan pemilihan yang sukses dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah ini,” tutupnya.

Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, KPU Bombana optimis partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak tahun ini akan meningkat, memberikan legitimasi kuat bagi pemimpin terpilih.

Bersama Aparat Kelurahan dan Masyarakat, Babinsa Koramil 01/Rumbia Lakukan Pembersihan Parit

Bombana, SultraNET. — Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan Parit di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir. Kegiatan ini melibatkan aparat kelurahan serta masyarakat setempat yang berpartisipasi aktif. Kamis, 21/11/2024

Lurah Lauru, Dahlan, SE, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan ini. “Saya sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif Babinsa. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan semoga dapat dilakukan secara rutin di wilayah kami,” ujarnya.



Sertu La Mbintara, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yang memimpin kegiatan, menjelaskan bahwa kerja bakti ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. “Parit yang bersih dapat mencegah banjir, dan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan kegiatan ini,” katanya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafruddin, turut memberikan tanggapan. “Saya sangat mendukung kegiatan ini. Kolaborasi antara Babinsa, aparat kelurahan, dan masyarakat adalah bentuk sinergi yang patut diapresiasi,” pungkasnya.

BRIDA Bombana Studi Banding Kelitbangan di Bappelitbangda Sulsel

Makassar , sultranet.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bombana melakukan kunjungan studi banding ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (20/11/2024).

Kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Dr. Andy, M.Si, bersama Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ristati Rahayu, AP, M.Si, di Ruang Rapat Bosowasipilu, lantai 1.

Dr. Andy, M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penghargaan atau reward untuk memotivasi OPD agar aktif berinovasi. Menurutnya, pemberian penghargaan akan menjadi insentif yang efektif untuk mendorong semangat inovasi di tingkat pemerintah daerah.

“Selain memotivasi, kegiatan inovasi ini juga menjadi ajang berbagi solusi kreatif yang bisa direplikasi. Ada banyak inovasi di Sulsel yang dapat diadopsi Kabupaten Bombana, dan sebaliknya. Kolaborasi ini akan memperkuat upaya kedua daerah dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Dr. Andy.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, AP, M.Si, memaparkan alur dan mekanisme teknis pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Sulsel pada 2023. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kriteria penilaian lomba agar sesuai dengan standar penginputan Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan secara nasional.

“Kriteria penilaian harus disusun secara detail dan terukur agar hasil inovasi yang terjaring dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan daerah. Kami juga menekankan aspek keberlanjutan dalam setiap inovasi yang diajukan,” jelas Ristati.

Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja sama antara BRIDA Kabupaten Bombana dan Bappelitbangda Sulsel. Kedua pihak sepakat untuk terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dalam upaya pengembangan riset dan inovasi di masing-masing wilayah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting, terutama dalam era yang menuntut inovasi sebagai solusi untuk tantangan pembangunan. Kami siap berbagi pengalaman dan mendukung upaya Bombana dalam meningkatkan kapabilitas kelitbang,” ujar Ristati Rahayu.



Kepala BRIDA Bombana, Sumarni mengungkapkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari teknis dan alur pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah yang telah diterapkan di Sulawesi Selatan.

“Kami ingin menggali informasi mengenai tata cara dan langkah-langkah strategis yang diterapkan Bappelitbangda Sulsel dalam menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah. Harapannya, kami dapat mereplikasi model ini di Bombana untuk menjangkau lebih banyak inovasi dan meningkatkan motivasi berinovasi di lingkungan pemerintahan,” ujar Sumarni.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, BRIDA Bombana berencana menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah pada tahun 2025. Lomba tersebut akan mencakup kategori untuk OPD dan masyarakat umum, dengan tujuan menjangkau inovasi-inovasi potensial sekaligus mendorong budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Kami berharap lomba ini dapat menjadi platform bagi masyarakat dan OPD untuk menunjukkan kreativitas mereka dalam mencari solusi inovatif yang

relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan peringkat Indeks Inovasi Daerah Bombana di tingkat nasional,” jelas Sumarni.

Selain membahas teknis pelaksanaan lomba, kunjungan ini juga menjadi forum diskusi untuk saling bertukar informasi terkait program kelitbangan yang telah berjalan di kedua daerah. Kabupaten Bombana berharap dapat mereplikasi beberapa program unggulan Sulsel yang dinilai relevan dan memberikan dampak positif.

Dengan kunjungan ini, BRIDA Bombana optimis dapat mengadopsi pengalaman dan praktik terbaik dari Sulawesi Selatan untuk memperkuat pelaksanaan program inovasi di Bombana. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi yang adaptif dan berkelanjutan, demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan inklusif. (adv)

Pj Gubernur Sultra Resmikan Mess Pemda di Makassar, Wujudkan Pelayanan Prima dan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah

MAKASSAR, sultranet.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berlokasi di Kota

Makassar, Rabu (20/11/2024).

Gedung enam lantai yang memiliki 32 kamar ini diharapkan menjadi fasilitas strategis untuk mendukung pelayanan dan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peresmian diawali dengan laporan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan mess dimulai pada 2019 di masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, dengan total anggaran Rp36,46 miliar. Proyek ini melalui enam tahap pembangunan hingga selesai pada 2024.

“Gedung ini menjadi aset penting yang telah melalui review Inspektorat dan siap dioperasikan untuk mendukung tugas pemerintah,” katanya.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung kinerja ASN, dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mess Pemda Sultra bukan hanya tempat tinggal sementara bagi ASN, tetapi juga simbol pelayanan pemerintah. Aset ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan mess harus memedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Mulai dari perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, hingga pengawasan, semua harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Dalam arahannya, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga mess dari praktik yang tidak bermoral.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya. Ini adalah uang rakyat, jadi pastikan fasilitas ini dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Andap berharap mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Mess ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Jadikan fasilitas ini sebagai tempat tinggal yang nyaman sekaligus pusat promosi daerah,” imbuhnya.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Sultra dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia menyebut, mess ini dapat menjadi simbol kolaborasi antarwilayah yang memberikan manfaat strategis bagi kedua provinsi.

Setelah menyampaikan sambutan, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan menekan hand sign pada layar dan memotong pita.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024, Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” untkapnya dengan khidmat.

Dalam kesempatan itu, Andap juga meninjau langsung fasilitas mess, mulai dari kamar tamu hingga ruang rapat dan ruang kerja atau *working space*. Ia memastikan semua fasilitas telah siap mendukung tugas ASN.

“Kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN yang bertugas di Makassar. Selain itu, mess ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembangunan di Sultra,” katanya kepada awak media.

Peresmian ini turut dihadiri Sekda Sultra, Plh. Asisten I Setda Sulsel, Sekda Kota Makassar, dan pejabat tinggi lainnya. Dalam penutupnya, Andap kembali mengingatkan semua pihak untuk merawat fasilitas ini dengan baik.

“Jangan biarkan aset sebesar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Mari kita manfaatkan untuk mendukung tugas pemerintahan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Dengan pengelolaan yang baik, Mess Pemda Sultra di Makassar diharapkan menjadi model pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat. (Adv)

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang Dampingi Petani Pilih Bibit Kelapa Sawit Unggul

Bombana, SultraNET. | - Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Pelda Adri, melakukan pendampingan kepada petani di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini difokuskan pada pemilihan bibit kelapa sawit unggul di tempat pembibitan milik Bapak Tomba. Rabu (20/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pelda Adri memberikan arahan kepada para petani mengenai pentingnya memilih bibit unggul atau berlabel agar proses pertumbuhan tanaman tidak mengalami kegagalan.

“Pemilihan bibit unggul menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit. Oleh karena itu, pastikan bibit yang disemai memiliki kualitas terbaik,” ujar Pelda Adri.



Lebih lanjut, Babinsa juga mengingatkan pentingnya pemberian pupuk yang seimbang.

“Pupuk yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman agar bibit kelapa sawit dapat tumbuh sehat dan maksimal,” jelasnya. Pendekatan ini dilakukan guna meningkatkan hasil panen petani di wilayah tersebut, yang pada akhirnya dapat mendukung program ketahanan pangan nasional.

Bapak Tomba, pemilik pembibitan, mengapresiasi kehadiran dan arahan dari Babinsa. Menurutnya, pendampingan seperti ini sangat membantu petani dalam memahami teknik budidaya yang tepat.

“Dengan pendampingan dari Babinsa, kami lebih percaya diri dalam mengelola tanaman kelapa sawit,” kata Bapak Tomba.

Selain memberikan edukasi kepada petani, kegiatan ini juga menunjukkan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Babinsa diharapkan terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipedesaan. (Pen)

Rajiun-Purnama Kebangkitan Muna

Solusi

MUNA, Sultranet.com - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 02, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, mendapat dukungan besar dalam kampanye dialogis di Desa Motewe, Kecamatan Lasalepa, Selasa (19/11/2024).

Dukungan ini datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh setempat yang optimistis pasangan ini mampu membawa perubahan signifikan bagi Kabupaten Muna.

Ali, salah satu tokoh masyarakat Desa Motewe, mengungkapkan keyakinannya bahwa LM Rajiun Tumada akan kembali meraih kemenangan di desanya, sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada 2020 saat Rajiun berpasangan dengan La Pili dan meraih suara terbanyak.

“Marilah kita bersama-sama datang ke TPS pada 27 November nanti untuk kembali memenangkan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna,” ajaknya.

Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Muna, Jafarudin, turut menegaskan dukungannya. Ia menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Muna yang menurutnya memerlukan pemimpin yang mampu membawa solusi nyata.

“Muna harus bangkit agar bisa bersaing dengan daerah lainnya. Solusinya adalah LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan. Mereka memiliki pengalaman dan jaringan luas di pusat, khususnya melalui Partai Gerindra,” ungkapnya.

Partai Garuda berkomitmen bekerja keras untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 serta mengawal setiap langkah mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna.

Dalam kampanye dialogis tersebut, LM Rajiun Tumada memaparkan visi dan misi

unggulan untuk membangun Muna, di antaranya program makan siang gratis untuk masyarakat sesuai visi Presiden terpilih Prabowo Subianto, pakaian sekolah gratis bagi siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP, serta STR kesehatan gratis.

Pasangan ini juga menawarkan tunjangan bagi RT/RW, peningkatan honor tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, pegawai sara, dan Satpol PP, jaminan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, serta perbaikan infrastruktur jalan di desa dan kota Raha.

“Tinggal delapan hari lagi masyarakat Muna akan menentukan pemimpin daerah ini. Saya yakin, masyarakat Desa Motewe akan kembali memberikan kepercayaannya kepada pasangan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan,” ujar Rajiun.

Pasangan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Motewe yang antusias menyambut program-program unggulan mereka, yang dinilai menjawab kebutuhan masyarakat Muna secara langsung dan nyata.

Pelantikan Ketua TP-PKK Pusat, TP-PKK Kolut Paparkan Komitmen Wujudkan Ketahanan Pangan

Jakarta, sultranet.com - Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., menghadiri pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Pusat TP-PKK serta Tim Pembina Posyandu masa bakti 2024-2029 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Acara ini sekaligus menjadi momentum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP-PKK tahun 2024 dengan tema “Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Persiapan Rakernas X PKK yang Berkualitas untuk Mendukung RPJMN 2024-2029”.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito

Karnavian, yang juga bertindak sebagai Pembina TP-PKK. Mendagri melantik Tri Suswati sebagai Ketua Umum TP-PKK dan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu masa jabatan 2024-2029.

Dalam arahannya, Tito meminta jajaran pengurus untuk fokus menjalankan program prioritas, termasuk visi besar Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Saya berharap TP-PKK dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan lorong-lorong untuk menanam komoditas seperti cabai dan tomat. Program ini telah terbukti efektif dan perlu diperluas,” ujar Tito dalam sambutannya.



Foto Kegiatan pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Pusat TP-PKK serta Tim Pembina Posyandu masa bakti 2024-2029

Pada kesempatan yang sama, Ny. Nurhayati Yusmin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mendukung program nasional ketahanan pangan. Ia menyampaikan, Pemkab Kolut telah meluncurkan beberapa inisiatif penting, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar

2.025 siswa.

“Selain itu, kami juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian seluas 5 hektare untuk menanam delapan jenis komoditas hortikultura, dengan melibatkan seluruh OPD. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal,” kata Nurhayati.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, TP-PKK Kolut aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan, seperti penyebaran 150 ribu benih ikan nila dan bandeng, yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.

“Semua program ini telah diinisiasi bersama sejak awal Oktober dan akan terus kami tingkatkan. TP-PKK Kolaka Utara berkomitmen untuk menjadi bagian penting dari solusi ketahanan pangan, sejalan dengan visi nasional yang dicanangkan Presiden dan Mendagri,” tambahnya.

Kegiatan pelantikan diikuti oleh seluruh Ketua TP-PKK provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Setelah pelantikan, agenda dilanjutkan dengan Rakornas TP-PKK sebagai persiapan menuju Rakernas X PKK mendatang.

Rakornas ini bertujuan menyusun strategi implementasi program yang berkontribusi langsung pada capaian RPJMN 2024-2029.

Sumber: Diskominfo Kolaka Utara

Dandim 1431/Bombana Pimpin Upacara Pelepasan Prajurit Purna Tugas

Bombana, SultraNET. | - Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., Pimpin upacara pelepasan Purna tugas Prajurit Kodim

1431/Bombana, Serma Abdul Hafid, kegiatan yang berlangsung dengan khidmat ini dilaksanakan di Lapangan Upacara Satya Mahawira Makodim 1431/Bombana, Jalan Poros Kendari-Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Rabu, 20/11/2024

Dalam sambutannya, Letkol Inf Andi Irfandi menyampaikan bahwa upacara ini merupakan bentuk penghormatan kepada Serma Abdul Hafid atas pengabdian selama masa dinas aktif.

“Ini adalah wujud penghargaan yang tulus dari TNI AD, sekaligus ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada anggota yang telah menyelesaikan tugasnya dengan penuh dedikasi,” ujar Dandim.



Letkol Andi Irfandi juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara purnawirawan dengan anggota aktif.

“Upacara seperti ini adalah sarana mempererat tali persaudaraan serta ikatan batin antara purnawirawan dan keluarga besar TNI AD, sehingga tetap ada hubungan yang harmonis meskipun sudah memasuki masa pensiun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dandim menekankan bahwa masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian. Ia mengingatkan bahwa seorang purnawirawan memiliki kesempatan lebih luas untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Pengabdian tidak berhenti di sini. Justru setelah ini, pengabdian akan lebih luas, terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mungkin sebelumnya belum sempat terjangkau,” jelasnya.



Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Andi Irfandi juga berpesan agar setiap tindakan di masa pensiun dapat dijadikan ladang amal.

“Segala yang kita lakukan hendaknya bermakna sebagai bentuk ibadah. Tugas yang datang harus dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bukan beban,” katanya.

Kegiatan Upacara ini juga dihadiri Ketua Persit KCK Cabang LXIV Dim 1431/Bombana, Ny. Fika Andi Irfandi, Para Perwira Staf, Para Danramil, Personel

Pemprov Sultra Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Lewat Analisis Standar Belanja 2025

KENDARI, sultranet.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan bahwa penerapan Analisis Standar Belanja merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan berbasis perencanaan dan penganggaran. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan ASB lebih optimal. Ia mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki dan menyesuaikan implementasi ASB demi tercapainya pengelolaan anggaran yang efisien.

Asrun menjelaskan bahwa penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus utama. Selain itu, penyusunan ASB untuk kegiatan non-fisik juga harus menjadi perhatian agar perencanaan dan penganggaran lebih lengkap. Ia optimistis semua kendala dapat diatasi melalui kerja sama tim penyusun ASB, bahkan bila diperlukan, melibatkan universitas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Rapat ini, menurut Asrun, sangat penting dalam memastikan setiap belanja daerah dilakukan secara efisien dan sesuai amanat peraturan. Ia merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan pentingnya ASB, standar harga satuan, dan standar teknis sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Asrun memberikan apresiasi atas kehadiran pimpinan OPD yang tetap berkomitmen menghadiri rapat meskipun di tengah kesibukan akhir tahun. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan penting dari para peserta untuk menyempurnakan dokumen ASB yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Dengan masukan konstruktif dari berbagai pihak, Sekda optimistis dokumen ASB dapat menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD.

Di akhir sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman bersama agar semua pihak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan solusi atas kendala yang ada tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Sultra.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan semangat kerja sama yang tinggi, Pemprov Sultra optimistis mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak positif bagi masyarakat. (adv)